

Siaran Pers

UNESCO menunjukkan 40% negara termiskin gagal mendukung pelajar yang berisiko selama krisis COVID-19 dan mendesak inklusi dalam pendidikan

Paris, 23 Juni — Kurang dari 10% negara-negara memiliki dasar hukum yang membantu memastikan inklusi penuh dalam pendidikan, menurut *Laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2020: Inklusi dan pendidikan - Semua berarti semua*.

Laporan ini memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor utama terhadap pengecualian peserta didik dalam sistem pendidikan di seluruh dunia termasuk latar belakang, identitas dan kemampuan (yaitu jenis kelamin, usia, lokasi, kemiskinan, disabilitas, etnis, stigma, bahasa, agama, migrasi atau status pengungsi, orientasi seksual atau ekspresi identitas gender, hukuman penjara, kepercayaan dan sikap). Hal ini mengidentifikasi buruknya pengecualian selama pandemi COVID-19 dan diperkirakan bahwa sekitar 40% negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak mendukung pelajar yang kurang mampu selama penutupan sementara sekolah.

Laporan Pemantauan Pendidikan Global (GEM) 2020 mendorong negara-negara untuk fokus pada mereka yang tertinggal saat sekolah dibuka kembali untuk membantu perkembangan masyarakat yang lebih tangguh dan setara.

“Untuk menghadapi tantangan zaman ini, langkah maju menuju pendidikan yang lebih inklusif adalah keharusan,” kata Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay. “Memikirkan kembali masa depan pendidikan adalah yang paling penting setelah pandemi Covid-19, yang telah membuat semakin lebar dan menyoroti ketidaksetaraan. Kegagalan untuk bertindak hanya akan menghambat kemajuan masyarakat. ”

Kegigihan pengecualian: Laporan tahun ini adalah laporan tahunan GEM UNESCO keempat untuk memantau kemajuan di 209 negara dalam mencapai target pendidikan yang diadopsi oleh Negara-negara Anggota PBB dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Laporan ini mencatat bahwa 258 juta anak-anak dan remaja sepenuhnya terkecualikan dari pendidikan, dengan kemiskinan sebagai hambatan utama dalam hal aksesibilitas. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, remaja dari 20% terkaya dari semua rumah tangga tiga kali lebih mungkin menyelesaikan sekolah menengah pertama dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga termiskin. Di antara mereka yang menyelesaikan pendidikan menengah pertama, siswa dari rumah tangga terkaya dua kali lebih mungkin memiliki keterampilan membaca dan matematika dasar daripada siswa dari rumah tangga termiskin. Terlepas dari target yang dinyatakan sebagai penyelesaian sekolah menengah atas universal pada tahun 2030, hampir tidak ada wanita muda pedesaan miskin yang menyelesaikan sekolah menengah di setidaknya 20 negara, kebanyakan dari mereka di Afrika sub-Sahara.

Juga menurut laporan ini, siswa berusia 10 tahun di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi yang diajari bahasa selain bahasa ibu mereka biasanya mendapat skor 34% di bawah penutur asli dalam tes membaca. Di sepuluh negara berpenghasilan rendah dan menengah, anak-anak dengan disabilitas diketahui 19% lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai kecakapan membaca minimum dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Di Amerika Serikat, misalnya, siswa LGBTI hampir tiga kali lebih mungkin mengatakan bahwa mereka berdiam diri di rumah dari sekolah karena merasa tidak aman.

Landasan yang tidak adil: Bersamaan dengan publikasi hari ini, tim Laporan UNESCO GEM meluncurkan situs web baru, [PEER](#), dengan informasi tentang peraturan dan kebijakan mengenai inklusi dalam pendidikan untuk setiap negara di dunia. PEER menunjukkan bahwa banyak negara masih mempraktikkan segregasi pendidikan, yang memperkuat stereotip, diskriminasi, dan keterasingan. Hukum di seperempat dari semua negara mengharuskan anak-anak dengan disabilitas untuk dididik dalam pengaturan yang terpisah, meningkat menjadi lebih dari 40% di Amerika Latin dan Karibia, serta di Asia.

Pengecualian terang-terangan: Dua negara di Afrika masih melarang perempuan hamil bersekolah, 117 mengizinkan pernikahan anak, sementara 20 belum meratifikasi Konvensi 138 dari Organisasi Buruh Internasional yang melarang pekerja anak. Di beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, anak-anak Roma dipisahkan di sekolah-sekolah umum. Di Asia, orang-orang terlantar, seperti Rohingya diajarkan dalam sistem pendidikan paralel. Di negara-negara OECD, lebih dari dua pertiga siswa dari latar belakang imigran bersekolah dimana mereka membentuk setidaknya 50% dari populasi siswa, yang mengurangi kesempatan mereka untuk sukses secara akademis.

“Covid-19 telah memberi kita kesempatan nyata untuk berpikir tentang sesuatu yang baru mengenai sistem pendidikan kita,” kata Manos Antoninis, Direktur Laporan Pemantauan Pendidikan Global. “Tapi pindah ke dunia yang menghargai dan menyambut keberagaman tidak akan terjadi dalam semalam. Ada ketegangan yang jelas antara mengajar semua anak di bawah satu atap dan menciptakan lingkungan tempat siswa belajar terbaik. Tetapi, COVID-19 telah menunjukkan kepada kita bahwa ada ruang untuk melakukan sesuatu secara berbeda, jika kita mengarahkan pikiran kita hal itu.”

Keyakinan diskriminatif orang tua ditemukan untuk membentuk satu penghalang untuk inklusi: Sekitar 15% orang tua di Jerman dan 59% di Hong Kong, Cina, takut bahwa anak-anak dengan disabilitas mengganggu pembelajaran siswa lain. Orang tua dengan anak-anak yang rentan juga ingin mengirim mereka ke sekolah yang menjamin kesejahteraan mereka dan menanggapi kebutuhan mereka. Di Queensland, Australia, 37% siswa di sekolah khusus telah pindah dari lembaga umum.

Laporan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan seringkali gagal memperhitungkan kebutuhan khusus peserta didik. Hanya 41 negara di seluruh dunia mengakui bahasa isyarat secara resmi dan, secara global, sekolah-sekolah lebih bersemangat untuk mendapatkan akses internet daripada melayani pelajar dengan disabilitas. Sekitar 335 juta anak perempuan bersekolah di sekolah yang tidak menyediakan layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang mereka perlukan untuk terus menghadiri kelas selama menstruasi.

Mengasingkan peserta didik: Ketika peserta didik tidak cukup terwakili dalam kurikulum dan buku teks mereka bisa merasa terasingkan. Anak perempuan dan perempuan hanya membuat 44% dari referensi di buku teks sekolah menengah berbahasa Inggris di Malaysia dan Indonesia, 37% di Bangladesh dan 24% di provinsi Punjab di Pakistan. Kurikulum di 23 dari 49 negara Eropa tidak membahas masalah orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender.

Para guru membutuhkan dan menginginkan pelatihan tentang inklusi, dimana kurang dari 1 dari 10 guru sekolah dasar di sepuluh negara berbahasa Prancis (*Francophone*) di Afrika sub-Sahara mengatakan mereka telah menerima pelatihan tersebut. Seperempat guru di 48 negara melaporkan bahwa mereka menginginkan lebih banyak pelatihan untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus.

Kekurangan yang kronis atas data berkualitas pada mereka yang tertinggal. Hampir setengah dari negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak mengumpulkan cukup data pendidikan tentang anak-anak dengan disabilitas. Survei rumah tangga adalah kunci untuk membuat rincian data pendidikan berdasarkan karakteristik individu. Tetapi 41% negara - rumah bagi 13% populasi dunia - tidak melakukan survei atau menyediakan data dari survei tersebut. Angka-angka pada pembelajaran sebagian besar diambil dari sekolah, gagal untuk memperhitungkan mereka yang tidak hadir.

"Data yang tidak memadai berarti kita kehilangan sebagian besar gambaran," kata Antoninis. "Tidak heran jika ketidaksetaraan yang tiba-tiba terungkap selama COVID-19 mengejutkan kami."

Tanda-tanda kemajuan menuju inklusi: Laporan GEM dan situs web PEER-nya mencatat bahwa banyak negara menggunakan pendekatan inovatif dan positif untuk transisi menuju inklusi. Banyak yang mendirikan pusat sumber daya untuk banyak sekolah dan memungkinkan perusahaan besar untuk mengakomodasi anak-anak dari sekolah khusus, seperti yang terjadi di Malawi, Kuba dan Ukraina. Gambia, Selandia Baru, dan Samoa menggunakan guru keliling untuk menjangkau populasi yang kurang terlayani.

Banyak negara juga terlihat keluar dari jalan mereka untuk mengakomodasi kebutuhan pelajar yang berbeda: negara bagian Odisha di India, misalnya, menggunakan 21 bahasa suku di ruang kelasnya, Kenya menyesuaikan kurikulumnya dengan kalender nomaden dan, di Australia, kurikulum dari 19% siswa disesuaikan oleh guru sehingga hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan siswa.

Laporan ini mencakup materi untuk kampanye digital, Semua berarti Semua, yang mempromosikan serangkaian rekomendasi utama untuk sepuluh tahun ke depan.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, B-ROLL, FOTO, UNTUK WAWANCARA, VIDEO DAN ANIMASI, SILAKAN HUBUNGI KATE REDMAN DI ALAMAT EMAIL K.REDMAN@UNESCO.ORG ATAU TELPON DI +33 (0) 671786234

Catatan untuk editor

Kunjungi [kit pers elektronik](#) Laporan yang berisi Laporan GEM dan materi multimedia. [**kata sandi: AllmeansAll**]

Laporan Pemantauan Pendidikan Global (Laporan GEM) dikembangkan oleh tim independen dan diterbitkan oleh UNESCO. Ini memiliki mandat resmi untuk memantau kemajuan dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentang pendidikan, SDG 4.

Situs PEER akan tersedia untuk umum mulai 23 Juni. Sebelum tanggal tersebut, jurnalis dapat mengakses situs menggunakan kata sandi berikut:

- <https://www.education-profiles.org>
- Nama pengguna: team
- Kata Sandi: gemprofiles246!